

Judul : Harga pangan meningkat, Marsiaman sarankan sinergi hadapi inflasi
Tanggal : Rabu, 14 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Harga Pangan Meningkat Marsiaman Sarankan Sinergi Hadapi Inflasi

GERAKAN Nasional Penanggulangan Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Riau resmi dihentikan di Pulau Birandang, Kampar, Riau, Senin (12/9). Gerakan ini untuk menghadapi inflasi harga pangan yang disebabkan meningkatnya kebutuhan, sementara pasokan masih kurang.

Inflasi tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia yang dipicu oleh terganggunya rantai pasok pangan dan energi global. Bermula dari konflik antara Ukraina dengan Rusia.

Data per Juli 2022, Riau berada pada posisi keempat provinsi tertinggi inflasi yakni mencapai 7,04 persen *year on year* (yoy).

Anggota Komisi XI DPR Marsiaman Saragih menekankan perlunya sinergi dari semua *stakeholder* untuk menanggulangi pergerakan inflasi di daerah. Sinergi itu dengan cara gotong royong.

"Dengan cara ini, berulang kali telah terbukti Indonesia dapat melalui tekanan dan masalah yang muncul," ujar Marsiaman, kemarin.

Selain itu, lanjutnya, dukungan akses pembiayaan dan teknis juga berguna untuk optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini akan menopang pemenuhan kebutuhan pangan

lokal mandiri dan mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari provinsi lain.

Marsiaman berharap, keberhasilan program pemberdayaan BUMDes Riau semakin memperkuat upaya membawa inflasi pangan sesuai target. Sehingga, kestabilan harga dan ketahanan pangan nasional dapat tercapai.

Tak lupa, Marsiaman mengapresiasi Gubernur Riau Syamsuar sebagai komandan tim pengendali inflasi daerah di Riau. Termasuk, dukungan dari Bank Indonesia Riau yang telah turut membantu para petani melalui Program Sosial Bank Indonesia.

"Kami sebagai anggota dewan memiliki jaringan kerja dengan banyak kelompok tani dan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," ujar politikus PDIP ini.

Dia menjelaskan, kebutuhan para petani saat ini adalah lahan, modal dan alat kerja. Selama ini, pihaknya bersama Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan bantuan berupa alat kerja ke kelompok tani dan UMKM.

Untuk itu, Marsiaman mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) memikirkan bagaimana para petani mendapat bantuan modal dan lahan untuk dikerjakan. ■ TIF